



PENILAIAN MATERIALITAS ATAS LAPORAN KEBERLANJUTAN PADA 12 PERUSAHAAN INFRASTUKUR

Veronica Lie NIM : 34209078

(Dr. Carmel Meiden, SE Ak, Msi, CA, CSRA.)

Veronica LIE¹, Carmel MEIDEN²

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Corresponding Author. Email: veroliee122@gmail.com

ABSTRACT

Materialitas merupakan konsep penting dalam laporan keberlanjutan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana apakah materialitas didefinisikan dalam laporan keberlanjutan? bagaimana peran pemangku kepentingan dipertimbangkan? dan apa masalah material utama yang diidentifikasi oleh sektor infrastruktur? Konsep materialitas yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keberlanjutan didasarkan pada GRI 2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori stakeholder, teori legitimasi, dan teori manajemen yang baik. Proses penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis data menggunakan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Satuan analisis berupa 12 laporan keberlanjutan tahun 2020 yang diterbitkan oleh perusahaan sektor infrastruktur dianalisis untuk mengetahuinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kata kunci berupa dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dalam definisi masalah materialitas. Selanjutnya peran pemangku kepentingan terdiri dari 4 tahap yaitu identifikasi, analisis, validasi, penentuan prioritas. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa definisi isu materialitas utama dari laporan keberlanjutan adalah dampak terhadap masalah ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan. Masalah material utama di perusahaan sektor infrastruktur didasarkan pada masalah ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kata Kunci: Keberlanjutan, Laporan Keberlanjutan, Materialitas, Pemangku Kepentingan, Infrastruktur.



ABSTRACT

Materiality is an important concept in sustainability reports. The problem in this research is how is materiality defined in the sustainability report? how is the role of stakeholders considered? and what are the main material problems identified by the infrastructure sector?

The concept of materiality used in the reference in making the sustainability report is based on GRI 2016. The theories used in this study are stakeholder theory, legitimacy theory, and good management theory.

The research process was carried out using data analysis methods using 3 stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The unit of analysis in the form of 12 sustainability reports in 2020 published by infrastructure sector companies is analyzed to find out.

The results of this study indicate that there are keywords in the form of economic, environmental and social impacts in the definition of materiality issues. Furthermore, the role of stakeholders consists of 4 stages, namely identification, analysis, validation, prioritization.

The conclusion of this study shows that the definition of the main materiality issue of the sustainability report is the impact on the company's economic, social and environmental issues.

The main material problems in infrastructure sector companies are based on economic, social and environmental issues.

Keywords: Sustainability, Sustainability Report, Materiality, Stakeholders, Infrastructure.

1. Pendahuluan

Laporan keberlanjutan merupakan suatu laporan yang wajib dibuat menurut POJK no. 51/POJK.03/2017 oleh para perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kewajiban yang dikeluarkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menyebabkan dalam beberapa terakhir muncul lonjakan laporan keberlanjutan perusahaan yang membuktikan bahwa perusahaan mulai memiliki rasa kepedulian terhadap keberlanjutan dalam hal sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, dalam penyusunan laporan keberlanjutan diperlukan adanya suatu standar atau bahasa universal yang mengatur. Salah satu standar yang mengatur laporan keberlanjutan ini adalah GRI Standar (2016).

Menurut GRI Standar (2016) prinsip pelaporan laporan keberlanjutan mencakup empat prinsip yaitu inklusivitas pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan. Materialitas mengidentifikasi topik berdasarkan dua dimensi yaitu suatu bahasan yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan yang diberikan oleh organisasi pelapor atau secara substantif memberikan pengaruh terhadap penilaian dan keputusan pemangku kepentingan.

Dengan adanya lonjakan laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh para emiten memungkinkan banyaknya ketidaklengkapan dan inkonsistensi yang teridentifikasi sebagai keterbatasan utama dalam materialitas laporan keberlanjutan.



serta aspek yang beragam terkadang bertentangan dengan masalah sosial, lingkungan dan ekonomi yang meluas sehingga mempersulit perusahaan untuk dapat memprioritaskan topik material dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana materialitas didefinisikan dalam laporan keberlanjutan?, bagaimana peran pemangku kepentingan dipertimbangkan?, dan apa masalah material utama yang diidentifikasi oleh sektor infrastruktur ? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana materialitas di definisikan dalam laporan keberlanjutan, untuk mengetahui pengaruh dan peran pemangku kepentingan, dan untuk mengetahui masalah material utama pada sektor Infrastruktur.

Proses penelitian dilakukan dengan metode analisis data dengan menggunakan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Unit analisis berupa 12 laporan keberlanjutan pada tahun 2020 yang di terbitkan perusahaan sektor infrastruktur di analisa untuk mengetahui bagaimana penilaian materialitas dilakukan.

1.2 Teori Pemangku Kepentingan

Istilah pemangku kepentingan pertama kali diciptakan oleh Stanford Research Institute (SRI) pada tahun 1963. Teori pemangku kepentingan adalah teori yang menjelaskan kepada siapa suatu perusahaan bertanggung jawab. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada direksi, karyawan, masyarakat, dan pihak lain dalam menjalankan seluruh kegiatan usaha. Teori pemangku kepentingan pada dasarnya adalah teori yang menggambarkan tanggung jawab sebuah bisnis tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan bagi investor dan pemilik, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sosial.

Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemiliknya (pemegang saham) seperti selama ini, tetapi beralih ke lingkup yang lebih luas, yaitu lingkup sosial (stakeholder), yang selanjutnya disebut tanggung jawab sosial. Fenomena ini terjadi karena adanya eksternalitas negatif dan kesenjangan sosial yang menciptakan kebutuhan masyarakat (Sofyan, 2015). Untuk itu, tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur dengan indikator ekonomi (economically terfokus) dalam laporan keuangan, kini harus diubah dengan memperhatikan faktor sosial (dimensi sosial) dari pemangku kepentingan internal dan eksternal.

1.3 Teori Legitimasi

Menurut Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975 yang dikemukakan oleh (Pamungkas, Ghozali, & Achmad, 2017) mengatakan:

“Legitimasi adalah hal yang penting dalam organisasi, mengandung batasan-batasan yang ditekankan oleh norma dan nilai-nilai sosial serta reaksi-reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan”.

Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray, 1996). Hal ini mengindikasikan adanya kontrak sosial antara perusahaan terhadap masyarakat dan adanya pengungkapan sosial lingkungan. Perusahaan menjalankan kontrak sosial harus menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku agar berjalan dengan selaras. Teori legitimasi yang didasarkan pada adanya kontak sosial antara sebuah institusi dengan masyarakat, dimana diperlukan sebuah tujuan institusi yang kongruen dengan nilai yang ada didalam sebuah masyarakat. Menurut teori ini, tindakan sebuah institusi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat.



1.4 Laporan Keberlanjutan

(Gray dan Bebbinton, 2001) menjelaskan bahwa laporan keberlanjutan adalah laporan non keuangan yang terpisah dari laporan keuangan. Laporan ini berfokus pada lingkungan yang didalamnya terdapat pernyataan, definisi, misi, pernyataan mengenai kebijakan atau tujuan, dan perkembangan pencapaian terkait lingkungan yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi.

Sustainability report (laporan keberlanjutan) menurut Global Reporting Initiative (GRI) adalah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari. Sustainability report juga menyajikan nilai-nilai organisasi dan model tata kelola, dan menunjukkan hubungan antara strategi dan komitmennya terhadap ekonomi global yang berkelanjutan. Sustainability report dapat membantu organisasi untuk mengukur, memahami, dan mengomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola mereka, dan kemudian menetapkan tujuan, dan mengelola perubahan secara lebih efektif. Sustainability report adalah platform utama untuk mengomunikasikan kinerja dan dampak keberlanjutan, baik positif maupun negatif. Sustainability report dapat dianggap menggabungkan analisis kinerja keuangan dan non-keuangan (Elkington, 1997).

Global Reporting Initiatives (GRI) merupakan salah satu pedoman yang digunakan mayoritas perusahaan atau organisasi di dunia. Dalam panduan pelaporan keberlanjutan, GRI membuat dua konsep standar pengungkapan, yaitu pengungkapan setandar umum dan pengungkapan standar khusus.

1.5 GRI Standar

(GRI, 2016) *Global Reporting Initiative* adalah sebuah wadah internasional yang berdiri sendiri yang menyokong perusahaan atau bisnis serta bertanggung jawab atas dampak yang dialami, dengan menyediakan satu bahasa yang global atau umum untuk dapat menyampaikan dampak tersebut.)

Adapun tujuan dari GRI standar itu sendiri adalah untuk menciptakan suatu prosedur pokok terkait akuntabilitas yang dapat menjamin suatu perusahaan agar patuh atas hakikat dari sikap terhadap lingkungan yang bertanggung jawab, yang selanjutnya dapat diperluas termasuk pada masalah tata kelola, sosial dan ekonomi.

1.6 AA1000AP

AA1000 *Accountability Principles* (selanjutnya disebut AA1000AP) disusun dengan tujuan untuk menyediakan seperangkat panduan (*guiding principles*) internasional yang praktis untuk organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang dapat diterima secara internasional yang digunakan untuk menilai, meningkatkan, mengelola dan mengomunikasikan serta mempertahankan kinerja akuntabilitas dan keberlanjutan perusahaan atau organisasi. Dalam AA1000AP (2018: 12-13), standar ini disusun sedemikian rupa agar dapat diaplikasikan oleh berbagai organisasi dari bidang apapun dan tidak memandang ukuran organisasi. Salah satu target utama dari bagian standar ini adalah untuk organisasi-organisasi yang ingin mengembangkan pendekatan yang terbuka, dapat diperhitungkan, dan juga strategis dalam proses kelola perusahaan terhadap kinerja keberlanjutan organisasi atau perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



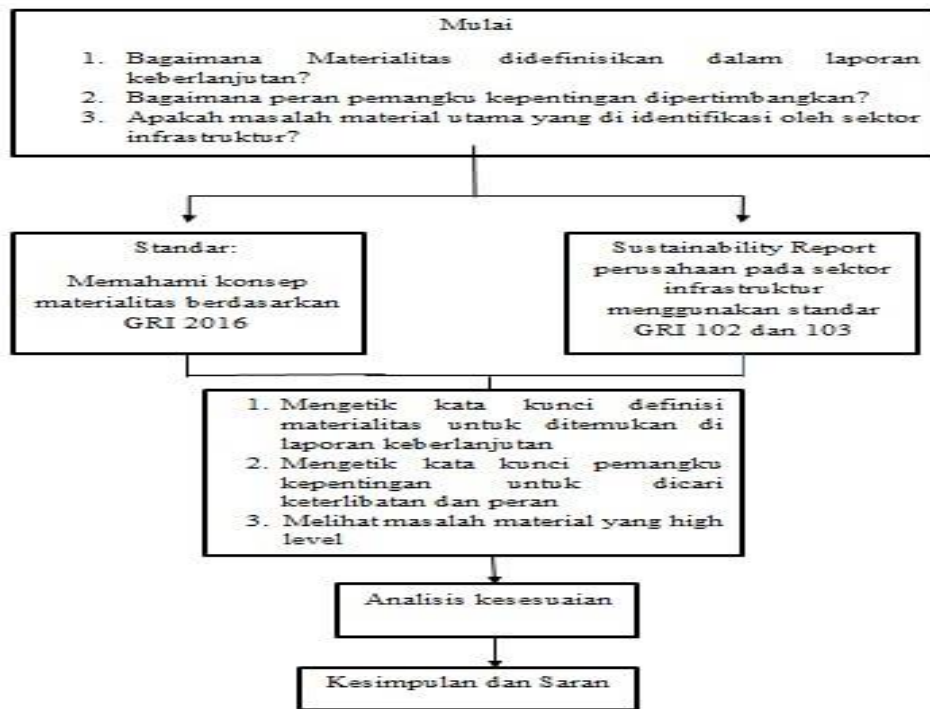
1.7 POJK No. 51/POJK.03/2017

POJK No. 51 Tahun 2017 mengatur mengatur terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Bertujuan untuk melaksanakan perekonomian lokal yang inklusif, sebanding, dan memiliki keberlanjutan dengan maksud akhir mewariskan kesejahteraan dari segi sosial dan ekonomi bagi semua, serta melindungi dan mengawasi lingkungan hidup.

Adapun maksud penerapan keuangan berkelanjutan adalah untuk menyediakan sumber daya keuangan yang memadai guna mencapai tujuan pembangunan yang berkaitan perubahan iklim, memperkuat ketahanan dan daya saing LJK, emiten, dan perusahaan publik dengan upaya manajemen risiko lingkungan dan sosial yang lebih baik dan/atau jasa yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan untuk memberikan kontribusi positif bagi keseimbangan sistem keuangan, meminimalisir ketimpangan sosial, meminimalisir kerusakan lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam. Serta meningkatkan pengembangan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang, teori, dan standar yang digunakan pada penelitian ini. Untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian ini, maka dibuat Bagan Alur penelitian sebagaimana di gambar 2.1. Pada penelitian ini dimulai dari adanya masalah. selanjutnya peneliti memahami konsep materialitas berdasarkan standar GRI 2016 dan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor infrastruktur. Dilanjutkan dengan mengetik kata kunci yang di cari lalu dianalisis kesesuaiannya dengan standar GRI 2016 dan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor infrastruktur selanjutnya ditarik kesimpulan dan saran.

Gambar 1: Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah kembali

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Jl. Cipta Milia Blok B1/1000, Gedung B1/1000, Cipta Milia, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan objek pada penelitian ini 12 laporan keberlanjutan dari perusahaan publik yang bergerak di Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diunduh melalui website resmi masing-masing perusahaan. Pemilihan sample dilakukan dengan cara *purposive sampling method* dengan kriteria-kriteria pengambilan sample, yaitu: (1) Perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di BEI (2) Perusahaan mempublikasikan laporan keberlanjutan (3) Perusahaan menyediakan menu laporan keberlanjutan tahun 2020 pada laman *website* resmi perusahaan.

2.1 Variabel Penelitian

Adapun variabel penelitian ini adalah :

1. Definisi isu materialitas, yaitu jumlah kata kunci yang mencakup definisi dari isu materialitas dinyatakan pada Laporan Keberlanjutan.
2. Keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu daftar pemangku kepentingan, jumlah frekuensi pertemuan para pemangku kepentingan yang diadakan dalam tahap identifikasi, penetapan, proses dari topik material Laporan Keberlanjutan.
3. Identifikasi masalah material utama, yaitu terkait dengan jumlah pengakuan dan pelaporan butir materialitas pada tingkat tinggi.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang digunakan yaitu peneliti memakai data berupa dokumen yang sudah ada. Dalam hal mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan mengamati dan mengumpulkan laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh 12 perusahaan sub sektor Infrastruktur tahun 2020, yang mana tersedia di laman *website* resmi dari masing-masing perusahaan. Selain itu peneliti melakukan riset pustaka dengan mempelajari literatur berupa karya ilmiah ataupun *text book* yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian guna menjadi landasan teori penelitian ini.

2.1 Teknik Analisis Data

(Sekaran dan Bougie, 2019) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti mencari data ilmiah dengan analisis dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Menurut (Miles dan Huberman, 2018) analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Teknik analisis data kualitatif terbagi dalam tiga aktivitas, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi Data

Data direduksi untuk memilih, memutuskan, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data yang berasal dari tulisan atau transkrip yang telah di-kumpulkan (Miles dan Huberman, 2018). Reduksi data merupakan proses untuk merangkum dan memilih data-data pokok dan fokus terhadap hal-hal penting untuk memudahkan penulis dalam proses



pengumpulan data selanjutnya akibat gambaran yang didapat penulis sudah lebih jelas.

2. Penyajian Data

Data disajikan untuk memahami sesuatu yang terjadi dan tindakan berikutnya yang harus dilakukan. Penyajian data kualitatif biasanya berupa tulisan yang bersifat naratif. Penyajian data dapat berupa suatu ukuran, grafik, diagram, tabel, dan jaringan hubungan. Data dikelola ke dalam bentuk tabel kategorisasi sesuai dengan tema-tema yang telah dikategorikan, lalu tema tersebut dijabarkan ke bentuk yang lebih konkret (subtema) lalu diakhiri dengan memberikan kode subtema sesuai dengan hasil wawancara (Miles dan Huberman, 2018).

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang diambil berdasarkan verifikasi atas analisis yang dilakukan sebelumnya. Kesimpulan berisi uraian naratif dari seluruh subtema yang ada dalam tabel kategorisasi sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian (Miles dan Huberman, 2018). Penarikan kesimpulan berisi deskripsi pembahasan terkait dengan hubungan materialitas dan peran pemangku kepentingan terhadap laporan keberlanjutan pada Sektor Infrastruktur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Definisi Materialitas

Dari 4 persyaratan atau kriteria yang dipakai dalam tabel, terdapat 5 dari 12 perusahaan yang mematuhi laporan keberlanjutan. Hal tersebut diakibatkan masih ada perusahaan yang masih belum menggunakan standar GRI sebagai standar pelaporan yang digunakan untuk menyusun laporan, melainkan penyusunan laporan hanya berdasarkan POJK atau GRI G4. Adapun perusahaan yang tidak menggunakan GRI sebagai standar penyusunan laporan dan tingkat kepatuhan adalah 0% ialah PT. Paramita Bangun Sarana Tbk, dan PT. Kencana Energi Lestari Tbk. Dari 4 kriteria, kriteria atau persyaratan yang paling banyak tidak dipatuhi adalah penulisan prinsip materialitas yang dipakai perusahaan dalam menentukan topik keberlanjutan material dan batasannya.

Adapun temuan khusus lainnya terkait penulisan daftar atau *list* topik material menurut perusahaan seperti topik material yang tidak disebutkan dengan lengkap adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang menuliskan bahwa terdapat 23 topik material menurut perusahaan namun hanya menyebutkan 21 topik keberlanjutan yang material dalam laporan keberlanjutan perusahaan tahun 2020. Berdasarkan perusahaan dengan tingkat kepatuhan 0% yang tidak menuliskan proses terkait materialitasnya juga tidak menuliskan topik keberlanjutan yang dianggap material menurut perusahaan karena tidak dilaksanakannya proses penentuan topik yang material.

3.1.2 Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam laporan keberlanjutan adalah penerapan sesuai dengan teori pemangku kepentingan yang menganggap pentingnya peran pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Dalam melakukan identifikasi terhadap pemangku kepentingannya, secara garis besar, perusahaan dalam sektor infrastuktur mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai pihak baik individu maupun kelompok yang berpengaruh dan terpengaruh oleh perusahaan. Beberapa perusahaan juga mengidentifikasi pemangku



kepentingannya berdasarkan 6 atribut yang merujuk pada AA1000SES yaitu *Dependency, Responsibility, Tension, Influence, Diverse Perspective*, serta *Proximity*.

Keterlibatan pemangku kepentingan juga adalah prinsip Standar GRI dalam penyusunan laporan keberlanjutan karena peran pemangku kepentingan dianggap penting untuk keberlanjutan perusahaan. Dalam Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI: 101 Landasan (2016: 8), setiap keterlibatan masing-masing pemangku kepentingan dalam perusahaan disampaikan dengan jelas dalam laporan keberlanjutan sebagai alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memahami harapan wajar dan kepentingan serta kebutuhan informasi setiap pemangku kepentingan. Pelibatan pemangku kepentingan internal seperti pemegang saham, karyawan, dan manajemen lintas divisi, serta pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah, masyarakat, media, pemasok atau *supplier*, dan konsumen dijelaskan dalam laporan keberlanjutan.

Pemangku kepentingan yang teridentifikasi dari setiap laporan keberlanjutan yang diteliti dengan jumlah pemangku kepentingan yang berbeda dari 5-10 pemangku kepentingan dan setelah dikumpulkan ditemukan 24 tipe pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan utama yang teridentifikasi setelah dilakukan penelitian berdasarkan frekuensi penyebutannya di atas 10 kali adalah Pemerintah (11), Pemegang Saham (12). Sedangkan pemangku kepentingan tipe sedang yaitu tipe pemangku kepentingan yang disebutkan sebanyak 6-10 kali adalah Karyawan (8) serta Pelanggan (9) Dan tipe pemangku kepentingan terakhir yaitu tipe rendah adalah pemangku kepentingan yang frekuensi penyebutannya kurang atau sama dengan 5 kali, seperti Media Massa (3), Komunitas Masyarakat (1), Kreditur (1), serta Pesaing (1).

3.1.3 Materialitas Utama Teridentifikasi

Isu atau topik keberlanjutan material yang diidentifikasi oleh perusahaan dan disampaikan dalam laporan keberlanjutan memiliki jumlah isu dan tingkat prioritas yang berbeda-beda, yang menunjukkan pendekatan pengujian materialitas yang digunakan oleh masing-masing perusahaan tidak sepenuhnya sama dan sangat tergantung oleh tantangan yang dihadapi masing-masing perusahaan yang mungkin berbeda, serta perbedaan keterlibatan pemangku kepentingan. Sebagaimana telah digambarkan pada pembahasan dalam penelitian ini, perusahaan yang telah mengidentifikasi topik material sudah membagi topik kedalam isu ekonomi, sosial, lingkungan, dan topik lainnya dengan variasi jumlah topik 7-27 topik. Dalam pembahasan, topik materialitas tingkat bawah (*Lower Level*) tidak dicantumkan karena dianggap tidak material. Hasilnya, ditemukan 23 topik terkait isu ekonomi yang disebutkan dengan topik utama yang paling sering disebut dengan prioritas tinggi adalah kinerja ekonomi (5), dampak ekonomi tak langsung (3), dan anti-korupsi (4), ditambah topik lainnya dengan prioritas tinggi namun disebutkan oleh kurang atau sama dengan dari 5 yaitu Dampak ekonomi langsung, Kehadiran pasar, Pemasok lokal, Pertumbuhan kinerja keuangan, Praktik perdagangan

Dari seluruh topik material yang disebutkan dalam laporan keberlanjutan, didapat 60 topik terkait isu sosial dengan topik utama dengan prioritas tinggi dan berdasarkan frekuensi penyebutan adalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (9), Masyarakat Lokal (5), Pelatihan dan Pendidikan Karyawan (5), ditambah topik lainnya terkait isu sosial yang juga disebutkan kurang atau sama dengan 5 kali dengan prioritas tinggi seperti Kepegawaian, Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan, Keanekaragaman dan Kesempatan setara, Non Diskriminasi, Penyediaan fasilitas dan layanan yang baik, Pendidikan, Pemasaran dan pelabelan, Kerja Paksa/Wajib Kerja, Privasi Pelanggan, Pembangunan yang berkelanjutan, Peningkatan Pengetahuan, Kepatuhan sosial ekonomi, Program pengembangan SDM, Hubungan tenaga



kerja dan manajemen, Produk dan layanan, Pekerja Anak, Keterlibatan Komunitas, Manajemen Rantai Persediaan, HAM, Praktik Pengamanan, Hubungan industrial, Kebebasan berserikat, Kepuasan pelanggan, Inovasi dan Pengembangan Teknologi, serta Verifikasi kepatuhan operasional.

Kemudian, jumlah topik terkait isu lingkungan didapatkan sebanyak 38 topik. Dari 38 topik tersebut, terdapat topik utama dengan prioritas tinggi dan disebutkan lebih dari 5 kali yaitu Air(6) dan Energi (6), serta topik dengan prioritas tinggi lainnya namun frekuensi penyebutannya kurang dari 6 kali seperti Kepatuhan Lingkungan, Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berkelanjutan, Material, Penilai lingkungan pemasok, serta Keanekaragaman Hayati. Selain topik keberlanjutan dengan prioritas tinggi, ada topik yang disebutkan dengan prioritas sedang kebawah seperti Pembangunan Bangunan Hijau, Pengelolaan Limbah B3. Terdapat juga identifikasi yang dilakukan terhadap isu lainnya seperti isu tata kelola seperti perilaku bisnis yang etis, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik, dan isu tata pemerintahan seperti Kepatuhan terhadap seluruh persyaratan peraturan terkait.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Definisi Materialitas

Pada penelitian pengungkapan terhadap definisi isu materialitas dalam laporan keberlanjutan perusahaan sektor infrastruktur yang dilakukan, ditemukan total 9 definisi isu materialitas berdasarkan kata kunci menurut 9 perusahaan (PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, PT. Nusantara Infrastructure Tbk, PT. Paramita Bangun Sarana Tbk, PT. Pembangunan Perumahan Tbk, PT. Totalindo Eka Persada Tbk, PT. Jasa Armada Indonesia Tbk, PT. Garuda Indonesia Tbk, PT. Kencana Energi Lestari Tbk , PT. Cikarang Listrindo Tbk) yang menyebutkan definisi materialitas dan 3 perusahaan (Waskita Karya Persero Tbk, PT. XL Axiata Tbk, dan PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk) yang tidak menyebutkan definisi materialitas. Dampak terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial adalah definisi isu materialitas utama karena merupakan definisi yang paling banyak dipakai dan disebutkan dalam 12 laporan keberlanjutan yaitu sebanyak 5 kali. Selain 3 definisi materialitas utama tersebut, definisi isu materialitas lainnya pada perusahaan sektor infrastruktur adalah definisi kedua yang paling banyak disebutkan berdasarkan frekuensi penyebutannya adalah pengaruh pada penilaian, perhatian, dan keputusan pemangku kepentingan, pengurangan emisi, pengelolaan limbah dan sampah, serta pemberdayaan masyarakat yang disebutkan sebanyak masing-masing 2 kali. Kelompok definisi materialitas terakhir yang paling sedikit disebutkan dalam laporan keberlanjutan yaitu sebanyak 1 kali adalah dampak pada bisnis, tujuan bisnis jangka panjang perseroan, Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Pencapaian tahun 2020, dan tantangan serta peristiwa penting yang terjadi.

3.2.2 Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan yang teridentifikasi dari setiap laporan keberlanjutan yang diteliti dengan jumlah pemangku kepentingan yang berbeda dari 5-10 pemangku kepentingan dan setelah dikumpulkan ditemukan 24 tipe pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan utama yang teridentifikasi setelah dilakukan penelitian berdasarkan frekuensi penyebutannya diatas 10 kali adalah Pemerintah (11), Pemegang Saham (12). Sedangkan pemangku kepentingan tipe sedang yaitu tipe pemangku kepentingan yang disebutkan sebanyak 6-10 kali adalah Karyawan (8) serta Pelanggan (9) Dan tipe pemangku kepentingan terakhir yaitu tipe



rendah adalah pemangku kepentingan yang frekuensi penyebutannya kurang atau sama dengan 5 kali, seperti Media Massa (3), Komunitas Masyarakat (1), Kreditur (1), serta Pesaing (1).

3.2.3 Materialitas Utama Teridentifikasi

Ditemukan 23 topik terkait isu ekonomi yang disebutkan dengan topik utama yang paling sering disebut dengan prioritas tinggi adalah kinerja ekonomi (5), dampak ekonomi tak langsung (3), dan anti-korupsi (4), ditambah topik lainnya dengan prioritas tinggi namun disebutkan oleh kurang atau sama dengan 5 yaitu Dampak ekonomi langsung, Kehadiran pasar, Pemasok lokal, Pertumbuhan kinerja keuangan, Praktik perdagangan. Didapat 60 topik terkait isu sosial dengan topik utama dengan prioritas tinggi dan berdasarkan frekuensi penyebutan adalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (9), Masyarakat Lokal (5), Pelatihan dan Pendidikan Karyawan (5), ditambah topik lainnya terkait isu sosial yang juga disebutkan kurang atau sama dengan 5 kali dengan prioritas tinggi seperti Kepegawaian, Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan, Keanekaragaman dan Kesempatan setara, Non Diskriminasi, Penyediaan fasilitas dan layanan yang baik, Pendidikan, Pemasaran dan pelabelan, Kerja Paksa/Wajib Kerja, Privasi Pelanggan, Pembangunan yang berkelanjutan, Peningkatan Pengetahuan, Kepatuhan sosial ekonomi, Program pengembangan SDM, Hubungan tenaga kerja dan manajemen, Produk dan layanan, Pekerja Anak, Keterlibatan Komunitas, Manajemen Rantai Pasok, HAM, Praktik Pengamanan, Hubungan industrial, Kebebasan berserikat, Kepuasan pelanggan, Inovasi dan Pengembangan Teknologi, serta Verifikasi kepatuhan operasional.

Kemudian, jumlah topik terkait isu lingkungan didapatkan sebanyak 38 topik. Dari 38 topik tersebut, terdapat topik utama dengan prioritas tinggi dan disebutkan lebih dari 5 kali yaitu Air (6) dan Energi (6),

3. Simpulan dan Saran

Sebagian besar perusahaan sudah menyampaikan definisi isu materialitas dalam laporan keberlanjutan. Terdapat variasi pada setiap perusahaan dalam mendefinisikan isu materialitas dalam laporan keberlanjutan. Kata kunci utama berdasarkan frekuensi penyebutannya adalah dampak terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial. Pemangku kepentingan utama dalam infrastruktur berdasarkan frekuensi penyebutan dalam laporan keberlanjutan adalah Karyawan, Masyarakat, Pemerintah, serta Pemegang Saham. Peran para pemangku kepentingan utama dalam perusahaan disertakan melalui pengungkapan pada laporan keberlanjutan yang ditunjukkan dalam tabel keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap perusahaan secara detail dan disertai dengan respon dan tanggapan perusahaan dengan keterlibatan pemangku kepentingan paling banyak pada tahap prioritas penentuan topik material. Adapun saran bagi perusahaan yang sudah mendefinisikan materialitas, memaparkan terkait keterlibatan pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi masalah materialitas utama dengan baik untuk dapat mempertahankan ketiga poin tersebut serta meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keberlanjutan itu sendiri. Namun perlu adanya peningkatan secara khusus bagi perusahaan yang dinilai masih kurang dalam memaparkan ketiga poin yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan ini, serta diperlukan untuk peningkatan dalam transparansi proses penilaian materialitas dengan mengikuti pedoman yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan, serta menjaga kepercayaan dari para pengguna laporan keberlanjutan itu sendiri. Selain itu, hal yang dapat diperhatikan bagi peneliti selanjutnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKGG.



adalah untuk dapat mencari isu permasalahan lainnya terkait materialitas dan standar GRI, serta menggunakan objek penelitian dan tahun penelitian terkini dan diperkuat dengan adanya wawancara dari salah satu emiten.

Daftar Pustaka

- AccountAbility. (2018). AA1000 Accountability Principles. *AccountAbility*, 40.
- Aryal, N. (2017). *Materiality assessment in sustainability reporting: case study of the airline industry*. 1–64.
- Beske, F., Hausteine, E., & Lorson, P. C. (2020). Materiality analysis in sustainability and integrated reports. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11(1), 162–186. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-12-2018-0343>
- GRI. (2016). *Pengungkapan Umum 2016*, 1 (2016).
- Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 2016 : 101 Landasan, Global Reporting Initiative 30 (2016).
- Gray, et al. (1996). *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Prentice Hall Europe, Hemel Hempstead.
- Pamungkas, I. D., Ghozali, I., & Achmad, T. (2017). The effects of the whistleblowing system on financial statements fraud: Ethical behavior as the mediators. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(10), 1592–1598.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Kecahlian* (Vol. 6).
- Sofyan, S. H. (2015). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak Kwik Kian Gie.

Match Overview

18%

1	dspace.uil.ac.id	7%
2	aimos.ugm.ac.id	4%
3	www.coursehero.com	3%
4	konsultasiskripsi.com	1%
5	jurnal.kwikkiangle.ac.id	1%
6	mul-lplheda.org	1%
7	repository.uinsu.ac.id	1%
8	bali.tribunnews.com	1%
9	peraturan.bpk.go.id	1%
10	eraconsulting.co.id	1%

Document Title: PENILAIAN MATERIALITAS ATAS LAPORAN KEBERLANJUTAN PADA 12 PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR

Author: Veronica LIE¹, Carmel MEIDEN²

ABSTRACT

Materiality is an important concept in sustainability reports, to disclose the information required by the standard. The problem in this research is how is materiality defined in the sustainability report?, how is the role of stakeholders considered? and what are the main material problems identified by the infrastructure sector?

The concept of materiality used in the reference in making the sustainability report is based on GRI 2016. The theories used in this study are stakeholder theory, legitimacy theory, and good management theory.

The research process was carried out using data analysis methods using 3 stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The unit of analysis in the form of 12 sustainability reports in 2020 published by infrastructure sector companies is analyzed to find out how the materiality assessment is carried out.

The results of this study indicate that there are keywords in the form of economic, environmental and social impacts in the definition of materiality issues. Furthermore, the role of stakeholders consists of 4 stages, namely identification, analysis, validation, prioritization. K3) and energy. The conclusion of this study shows that the definition of the main materiality issue of the sustainability report is the impact on the company's economic, social and environmental issues. Stakeholders are employees, community, government and shareholders. The main material problems in infrastructure sector companies are based on economic, social and environmental issues.

Keywords: Sustainability, Sustainability Report, Materiality, Stakeholders, Infrastructure.

1. Pendahuluan

Laporan keberlanjutan merupakan suatu laporan yang wajib dibuat menurut POJK no. 51-POJK.03/2017 oleh para perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kewajiban yang dikeluarkan melalui Peraturan Otoritas Jasa

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, persisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I :

Veronica Lie

NIM :

34200878

Tanggal Sidang :

6 September 2022

Judul Karya Akhir :

Penilaian Matrialitas atas Laporan Keberlanjutan
pada 12 Perusahaan Infrastruktur

Jakarta,

19 / September 20 22

Mahasiswa/I

Veronica Lie

Pembimbing

(.....)